

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta.
- Eide, Asbjorn (eds.), 2001, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Edisi Kedua)*, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.
- H.R., Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 1994, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- H.S., Salim, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- M. Hadjon, Philipus, et.al., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudiko, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, PTRajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Sigit, Soetaryo, 1992, "Sejarah dan Kebijaksanaan Pengembangan Pertambangan Indonesia", Marangin Simatupang dan Soetaryo Sigit (ed), *Pengantar Pertambangan Indonesia*, Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA-Indonesia Mining Association).
- Soehino, 2004, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi di Daerah*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

-----, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

S.W. Sumardjono, Maria, *et.al.*, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia Antara yang Tersurat dan Tersirat*, UGM Press, Yogyakarta.

Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Prosedur Perijinan Pertambangan Rakyat, 1995, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 62).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Rakyat (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 112).

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Hasil Pembahasan Antara Eksekutif Dengan Pansus BA 1 Tahun 2009 DPRD DIY) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

Surat Edaran Dirjen ESDM No. 04.E/30/DJB/2015 pada tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan

Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan

Putusan MK Nomor 25/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Putusan MK Nomor 32/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Putusan MK Nomor 10/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Makalah/Laporan Penelitian

An'amta, Dimas Asto Aji, 2015, *Konflik Sosial Pertambangan Emas Tanpa Izin*, Tesis, Program Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Asy'ari, Syukri, *et.al.*, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4, Desember 2013.

Puluhalawa, Fenty U., Junus, Nirwana, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat di Provinsi Gorontalo*, Laporan Penelitian, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.

Putri, Nabilla Desyalika, 2015, *Implikasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Susilowati, Eny, 2010, *Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di Aliran Sungai Samba*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tjahjono Setiabudi, Bambang, 2005, *Penyebaran Merkuri Akibat Usaha Pertambangan Emas di Daerah Sangon, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta*, Kolokium Hasil Lapangan-DIM, Pusat Sumber Daya Geologi, Bandung.

Suhartini, Iin, "Kajian Teoritis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Wilayah Pertambangan (Studi Terhadap putusan MK No. 10/PUU-X/2012)", Jurnal Beraja Niti, Vol. 2, No. 6, 2013.

Herman, Danny Z., 2006, "Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil", Buletin Kelompok Kerja Konservasi, Pusat Sumber Daya Geologi.

Helmi, Zaki Helmi, *Analisis Spasial Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Bahan Galian Sirtu di Sungai Kampar Kecamatan Tambang dan Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau*, Tesis, Program Pascasarjana Geologi Pertambangan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Internet

Anonim, “Diprotes Warga Pengolahan Limbah Emas Ditutup”, <http://kulonprogonews.com/news/diprotes-warga-pengolahan-limbah-emas-ditutup/> diakses pada tanggal 16 Maret 2016.

Anonim, “Polisi Tangkap Penambang Tradisional”, <http://www.koran-o.com/2011/peristiwa/po%C2%ADli%C2%ADsi-tang%C2%ADkap-pe%C2%ADnam%C2%ADbang-tra%C2%ADdi%C2%ADsio%C2%ADnal-6444> diakses pada tanggal 16 Maret 2016.

Anonim, “Emas”
<http://www.tekmira.esdm.go.id/data/Emas/ulasan.asp?xdir=Emas&commId=11&comm=Emas> diakses pada tanggal 21 Februari 2016.

Dalam Negeri, Kementerian, “Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Pembagian Peran Antara Provinsi, dan Kabupaten/Kota”, <http://www.depkes.go.id/resources/download/rakerkesnas-2015/DEPDAGRI.pdf>, diakses pada tanggal 16 Juli 2016.

Nugraha, Singgih Wahyu, “Pemkab Kulonprogo Dilematis Tertibkan Tambang Emas Liar”, <http://jogja.tribunnews.com/2014/05/13/pemkab-kulonprogo-dilematis-tertibkan-tambang-emas-liar>, diakses pada tanggal 20 April 2016.

Panuju Triangga, “Warga Diperbolehkan Menambang Emas”, <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/12/23/104980/Warga-Diperbolehkan-Menambang-Emas>, diakses pada tanggal 14 Maret 2016.

PT Freeport Indonesia, “Tentang PTFI”, ptfi.co.id/id/about, diakses pada tanggal 18 Maret 2016.

Safa’at, Muchamad Ali, “Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK”, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MK.pdf>, diakses pada tanggal 16 Juli 2016.

Sekarini, Rima Sekarani, “Masyarakat Kalirejo Menanti Izin Pertambangan Emas”, <http://m.harianjogja.com/baca/2016/04/15/izin-pertambangan-masyarakat-kalirejo-menanti-izin-pertambangan-emas-710702>, diakses pada tanggal 17 April 2016.

Sodik, “Dua Desa Diusulkan Jadi Wilayah Pertambangan”
<http://daerah.sindonews.com/read/683979/22/dua-desa-diusulkan-jadi-wilayah-pertambangan-1351589528>, diakses pada tanggal 17 Maret 2016.

Sumadiyono, “Desember, Tambang Emas Kokap Dilegalkan”,
<http://gaul.solopos.com/desember-tambang-emas-kokap-dilegalkan-343375>, diakses pada tanggal 17 Maret 2016.

Tomi, “Usulan Wilayah Tambang Rakyat Perlu Direvisi”,
<http://krjogja.com/read/279952/usulan-wilayah-tambang-rakyat-perlu-direvisi.kr>, diakses pada tanggal 17 Maret 2016.